

Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia: Peran Mediasi Belanja Daerah dalam Perspektif *Flypaper Effect* di Provinsi Kalimantan Tengah

Tiur Roida Simbolon^{1*}, Pratiwi Subianto², Muhammad Farras Nasrida

¹⁻³Universitas Palangkaraya, Indonesia

Alamat: Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

*Korespondensi penulis: tiurroida@feb.upr.ac.id

Abstract. Fiscal decentralization aims to improve human development by strengthening local governments' fiscal capacity. However, increased fiscal resources do not always lead to better human development outcomes, particularly in regions with high dependence on intergovernmental transfers. This study examines the effects of Local Own-Source Revenue (PAD) and Intergovernmental Transfers (TKD) on the Human Development Index (HDI) through the mediating role of Regional Expenditure in the districts and municipality of Central Kalimantan Province. An explanatory quantitative approach was employed using panel data from 14 local governments during 2019–2024. Data were analyzed using panel regression and causal mediation analysis. The results reveal that PAD and TKD positively affect Regional Expenditure, with TKD exerting a stronger influence, indicating the presence of the *Flypaper Effect*. In addition, PAD, TKD, and Regional Expenditure significantly improve HDI, while Regional Expenditure partially mediates the relationship between fiscal capacity and human development. These findings suggest that sustainable human development depends not only on fiscal capacity but also on the effectiveness of public expenditure allocation. The study contributes to the fiscal decentralization literature by integrating Fiscal Federalism Theory, *Flypaper Effect* Theory, Fiscal Illusion Theory, and Human Development Theory, while providing policy implications for strengthening local fiscal independence and improving the quality of regional expenditure.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfers, Regional Expenditure, Human Development Index, Central Kalimantan.

Abstrak. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Namun, peningkatan kapasitas fiskal tidak selalu diikuti oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap IPM dengan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data panel dari 14 kabupaten/kota periode 2019–2024 yang dianalisis menggunakan regresi data panel dan *causal mediation analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan TKD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dengan pengaruh TKD yang lebih dominan sehingga mengindikasikan adanya *Flypaper Effect*. Selain itu, PAD, TKD, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan Belanja Daerah memediasi secara parsial hubungan antara kapasitas fiskal dan pembangunan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal, tetapi juga oleh efektivitas pengalokasian Belanja Daerah. Penelitian ini memperkaya literatur desentralisasi fiskal serta memberikan implikasi kebijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas Belanja Daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Kalimantan Tengah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi yang menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan, tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga melalui peningkatan

akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Todaro & Smith, 2006). Dalam perspektif United Nations Development Programme (UNDP), keberhasilan pembangunan tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kapasitas fiskal menjadi faktor penting untuk mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak selalu bersifat linear karena tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup apabila manfaatnya tidak didistribusikan secara efektif melalui kebijakan publik (Bisai et al., 2020).

Fenomena tersebut terlihat di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2019–2024, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup tajam akibat pandemi COVID-19 dan dinamika ekonomi pascapandemi, sementara IPM justru menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mengalokasikan sumber daya publik. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Belanja Daerah sebagai instrumen utama penyediaan pelayanan publik. Secara teoritis, peningkatan kapasitas fiskal seharusnya mampu memperkuat pembiayaan sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas tata kelola, efisiensi alokasi anggaran, dan tingkat ketergantungan fiskal daerah (Rajkumar & Swaroop, 2008; Faguet, 2014).

Provinsi Kalimantan Tengah masih menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Transfer ke Daerah. Walaupun PAD, TKD, dan Belanja Daerah terus meningkat, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan percepatan pembangunan manusia yang sebanding. Kondisi ini mencerminkan adanya paradoks fiskal, yaitu besarnya kapasitas anggaran belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti dengan pengalokasian belanja yang efektif. Fenomena tersebut selaras dengan konsep *Flypaper Effect*, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap peningkatan pendapatan yang berasal dari sumber daya daerah sendiri, sehingga struktur pembiayaan daerah berpotensi memengaruhi efektivitas belanja publik dalam meningkatkan pembangunan manusia.

Meskipun hubungan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia telah banyak dikaji, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa PAD berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, sedangkan pengaruh TKD masih bergantung pada kualitas pengelolaan belanja pemerintah. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menguji hubungan langsung antara kapasitas fiskal dan IPM, sementara peran Belanja Daerah sebagai mekanisme mediasi masih relatif jarang dianalisis, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh PAD dan TKD terhadap IPM dengan mempertimbangkan peran mediasi Belanja Daerah menggunakan pendekatan data panel. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan melalui integrasi perspektif *Flypaper Effect* untuk menjelaskan hubungan antara struktur penerimaan daerah, efektivitas belanja publik, dan pembangunan manusia, sekaligus memanfaatkan data panel kabupaten/kota untuk menghasilkan estimasi yang lebih komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Pembangunan Manusia (Human Development Theory)

Teori pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan, bukan sekadar faktor produksi. Menurut *Human Development Report*, pembangunan manusia berorientasi pada perluasan pilihan hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Human Development Report, 1990; United Nations Development Programme, 2004). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Todaro dan Smith (2006) menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan ekonomi dan sosial, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pembangunan manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025a). Selain itu, pembangunan manusia juga mencakup dimensi produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Feriyanto, 2014).

2.2 Teori Keuangan Publik dan Desentralisasi Fiskal

Keuangan publik merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ikhsan, 2020). Dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran melalui APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila didukung kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik (Faguet, 2014). Sebaliknya, efektivitas belanja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sangat bergantung pada kualitas *good governance*, sehingga besarnya anggaran tidak selalu menghasilkan pembangunan manusia yang lebih baik apabila pengelolaannya tidak efektif (Rajkumar & Swaroop, 2008).

2.3 Flypaper Effect Theory

Flypaper Effect menjelaskan bahwa pemerintah daerah cenderung memberikan respons belanja yang lebih besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau dikenal dengan prinsip *money sticks where it hits* (Hines & Thaler, 1995). Dalam konteks desentralisasi fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan belanja lebih dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD) daripada kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD. Akibatnya, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dapat memperbesar belanja daerah tanpa diikuti peningkatan kemandirian fiskal maupun efisiensi pengelolaan keuangan. Fenomena tersebut banyak dijumpai di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang struktur penerimaannya masih didominasi TKD. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menjelaskan apakah TKD memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan PAD serta bagaimana mekanisme tersebut berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Daerah.

2.4 Fiscal Illusion Theory

Fiscal Illusion Theory menjelaskan bahwa dominasi dana transfer dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap biaya riil penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah daerah maupun masyarakat cenderung kurang merasakan beban fiskal yang sebenarnya (Puviani, 1903; Buchanan, 1967; Oates, 1979). Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah berpotensi lebih bergantung pada transfer daripada mengoptimalkan PAD, sehingga

peningkatan kapasitas fiskal belum tentu berasal dari kemampuan ekonomi daerah. Akibatnya, belanja daerah berisiko kurang efisien dan tidak sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas alokasi Belanja Daerah. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa pengaruh PAD dan TKD terhadap Indeks Pembangunan Manusia bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya fiskalnya melalui Belanja Daerah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin besar fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Agus, 2020). Peningkatan PAD juga memperkuat kapasitas fiskal yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan investasi pada sektor-sektor publik (Nugroho & Hendrati, 2024; Al Rasyid & Indah K., 2023).

2.6 Transfer ke Daerah (TKD)

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesenjangan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023). TKD meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Fiskal, dan bentuk transfer lainnya. Bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, TKD menjadi sumber pembiayaan utama yang memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan apabila dialokasikan secara produktif (Pasa et al., 2023; Verawaty et al., 2020). Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap TKD berpotensi menurunkan insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sehingga kemandirian fiskal menjadi lebih rendah (Faguet, 2014).

2.7 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui APBD. Belanja daerah menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, di mana efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas alokasi pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Simanjuntak, 2012). Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan turut menentukan efektivitas belanja dalam menghasilkan pembangunan (Rajkumar & Swaroop, 2008). Oleh karena itu, Belanja Daerah berperan sebagai mekanisme yang mentransformasikan kapasitas fiskal pemerintah menjadi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia.

2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Human Development Report, 1990). Dibandingkan pertumbuhan ekonomi, IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat (Mirza, 2012). Peningkatan IPM dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan fiskal, terutama kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pada sektor pelayanan dasar (Arafat et al., 2020). Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah juga menjadi determinan penting dalam meningkatkan pembangunan manusia (Ginting et al., 2008).

2.9 Hubungan Antarvariabel

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Dalam perspektif *Fiscal Federalism*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas fiskal yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan daerah mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis. Namun, *Flypaper Effect Theory* menjelaskan bahwa pada daerah dengan ketergantungan fiskal yang tinggi, respons Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer dibandingkan PAD (Hines & Thaler, 1995). Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD tetap berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah karena memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan (Agus, 2020). Berdasarkan landasan teoritis dan

empiris tersebut, diajukan hipotesis: H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Belanja Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendukung penyediaan pelayanan publik. Sebagai komponen utama APBD di banyak daerah, TKD berperan besar dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah. Berdasarkan *Flypaper Effect Theory*, dana transfer cenderung lebih cepat diterjemahkan menjadi peningkatan Belanja Daerah dibandingkan PAD (Hines & Thaler, 1995). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa TKD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah karena meningkatkan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Verawaty et al., 2020; Pasa et al., 2023). Oleh karena itu, diajukan hipotesis: H2: Transfer ke Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *Human Development Theory*, Belanja Daerah merupakan instrumen yang mentransformasikan kapasitas fiskal menjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, besarnya anggaran tidak selalu meningkatkan IPM apabila tidak dialokasikan secara efektif, sebagaimana dijelaskan dalam *Fiscal Illusion Theory*. Oleh karena itu, efektivitas Belanja Daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan (Rajkumar & Swaroop, 2008; Simanjuntak, 2012). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diajukan hipotesis: H3: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perspektif *Fiscal Federalism Theory*, PAD mencerminkan kemandirian fiskal yang memperluas kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik. Selaras dengan *Human Development Theory*, peningkatan PAD akan meningkatkan IPM apabila dialokasikan pada program-program produktif yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pengaruh PAD bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran. Penelitian Al Rasyid dan Indah K. (2023) serta Nugroho dan Hendrati (2024) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Oleh karena itu, diajukan hipotesis: H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Transfer ke Daerah meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik yang mendukung pembangunan manusia. Namun, *Flypaper Effect Theory* dan *Fiscal Illusion Theory* menjelaskan bahwa besarnya transfer belum tentu meningkatkan IPM apabila pengelolaannya tidak efektif dan masih didominasi belanja yang kurang produktif (Hines & Thaler, 1995; Puviani, 1903; Buchanan, 1967; Oates, 1979). Penelitian Verawaty et al. (2020) serta Jin dan Jakovljevic (2023) membuktikan bahwa TKD berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia apabila didukung tata kelola yang baik. Berdasarkan hal tersebut, diajukan hipotesis: H5: Transfer ke Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Peran Mediasi Belanja Daerah

Dalam *Fiscal Federalism Theory*, PAD dan TKD menyediakan kapasitas fiskal, sedangkan Belanja Daerah menjadi mekanisme yang mentransformasikan kapasitas tersebut menjadi pelayanan publik. Sejalan dengan *Human Development Theory*, peningkatan pembangunan manusia bergantung pada efektivitas alokasi Belanja Daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di sisi lain, *Flypaper Effect Theory* dan *Fiscal Illusion Theory* menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah dapat memengaruhi kualitas pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, Belanja Daerah dipandang sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana PAD dan TKD memengaruhi IPM. Argumentasi ini didukung oleh Rajkumar dan Swaroop (2008) serta Faguet (2014). Berdasarkan landasan tersebut, diajukan hipotesis:

H6: Belanja Daerah memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H7: Belanja Daerah memediasi pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori (*explanatory research*) untuk menganalisis hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk menguji peran mediasi Belanja Daerah. Unit analisis meliputi 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (13 kabupaten dan 1 kota) selama periode 2019–2024,

sehingga diperoleh 84 observasi. Data panel dipilih karena mampu mengakomodasi variasi antarwilayah dan antarwaktu secara simultan, menghasilkan estimasi yang lebih efisien, mengurangi bias akibat heterogenitas yang tidak teramati, serta memberikan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi hubungan antarvariabel.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh data disusun dalam bentuk panel tahunan periode 2019–2024. Variabel keuangan dinyatakan dalam rupiah dan ditransformasikan ke logaritma natural (Ln) untuk mengurangi heteroskedastisitas, menstabilkan varians, serta mempermudah interpretasi koefisien regresi.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai variabel independen, Belanja Daerah (BD) sebagai variabel mediasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Operasionalisasi variabel disusun berdasarkan landasan teori dan indikator dari instansi resmi pemerintah. Seluruh variabel keuangan diukur berdasarkan realisasi APBD dan ditransformasikan ke dalam logaritma natural (Ln) untuk mengurangi perbedaan skala data dan memudahkan interpretasi elastisitas koefisien regresi, sedangkan IPM diukur menggunakan nilai indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi operasional, indikator, satuan, dan sumber data masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah	Ln Rupiah	DJPk Kemenkeu
Transfer ke Daerah	TKD	Dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri atas DAU, DAK, DBH, DID, dan transfer lainnya	Ln Rupiah	DJPk Kemenkeu

Belanja Daerah	BD	Seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Ln Rupiah	DJP Kemenkeu
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak	Indeks	BPS

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews 14, dengan pendekatan data panel yang mengombinasikan dimensi *cross section* (14 kabupaten/kota) dan *time series* (2019–2024) untuk menghasilkan estimasi yang lebih efisien serta mengendalikan heterogenitas antarwilayah.

Analisis diawali dengan statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik data. Selanjutnya, pemilihan model regresi panel dilakukan melalui Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai. Setelah model terpilih, dilakukan uji diagnostik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan *cross-sectional dependence*. Apabila ditemukan pelanggaran asumsi klasik, estimasi dilakukan menggunakan robust standard errors agar hasil regresi tetap konsisten dan efisien.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua model regresi panel. Model pertama bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah terhadap Belanja Daerah sebagai variabel mediasi. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln B D_{it} = \alpha + \beta_1 \ln P A D_{it} + \beta_2 \ln T K D_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

dengan:

1. $B D_{it}$ = Belanja Daerah pada daerah i tahun t ;
2. $P A D_{it}$ = Pendapatan Asli Daerah;
3. $T K D_{it}$ = Transfer ke Daerah;
4. α = konstanta;
5. β_1, β_2 = koefisien regresi;

6. μ_i = efek individual;
7. λ_t = efek waktu;
8. ε_{it} = galat penelitian.

Model kedua digunakan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Persamaan yang diestimasi adalah:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln TKD_{it} + \beta_3 \ln BD_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

dengan IPM_{it} merupakan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah i tahun t , sedangkan simbol lainnya memiliki definisi yang sama dengan model pertama.

Untuk menguji peran mediasi Belanja Daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan causal mediation analysis dengan menghitung pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), dan pengaruh total (*total effect*). Pengaruh tidak langsung diperoleh dari hasil perkalian koefisien jalur antara variabel independen terhadap Belanja Daerah dengan koefisien Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara matematis, pengaruh tidak langsung dirumuskan sebagai:

$$IE_{PAD} = \beta_{PAD \rightarrow BD} \times \beta_{BD \rightarrow IPM}$$

$$IE_{TKD} = \beta_{TKD \rightarrow BD} \times \beta_{BD \rightarrow IPM}$$

Sementara itu, pengaruh total dihitung sebagai penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, yaitu:

$$TE = DE + IE$$

Signifikansi efek mediasi diuji menggunakan bootstrapping sebanyak 5.000 resampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Efek mediasi dinyatakan signifikan apabila interval kepercayaan (*confidence interval*) hasil bootstrap tidak mencakup nilai nol. Pendekatan ini dipilih karena memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap distribusi pengaruh tidak langsung dibandingkan metode konvensional, serta banyak direkomendasikan dalam penelitian ekonomi dan kebijakan publik yang menguji hubungan mediasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian sebelum dilakukan estimasi model regresi panel. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), median, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai variasi kapasitas

fiskal pemerintah daerah maupun capaian pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode pengamatan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Median	Min	Max	Std. Dev.
Ln PAD	84	25.61	25.57	23.85	27.94	0.86
Ln TKD	84	27.84	27.81	26.91	29.05	0.54
Ln Belanja	84	28.12	28.09	27.02	29.36	0.57
IPM	84	71.84	71.67	66.45	81.35	3.84

Sumber: Data Diolah, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,84 dengan standar deviasi sebesar 3,84. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat pembangunan manusia antarwilayah yang relatif moderat. Variabel PAD memiliki variasi yang lebih tinggi dibandingkan TKD, mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal mandiri pemerintah daerah berbeda cukup besar. Sebaliknya, Transfer ke Daerah memiliki penyebaran data yang relatif kecil karena mekanisme alokasi transfer pemerintah pusat cenderung mengikuti formula tertentu sehingga variasinya antarwilayah tidak sebesar PAD.

4.2 Pemilihan Model Panel

Tabel 3. Chow Test

Statistik	Nilai	Prob.
Cross-section F	18.742	0.0000
Cross-section Chi-square	142.317	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2026.

Nilai probabilitas Chow Test lebih kecil dari 0,05 sehingga Fixed Effect Model lebih baik dibandingkan Common Effect Model.

Tabel 4. Hausman Test

Statistik	Nilai
Chi-square	21.357
Prob.	0.0015

Sumber: Data Diolah, 2026.

Hausman Test menunjukkan probabilitas sebesar 0,0015 ($<0,05$), sehingga Fixed Effect Model lebih sesuai dibandingkan Random Effect Model.

Tabel 5. Ringkasan Pemilihan Model

Pengujian	Hasil
Chow Test	FEM
Hausman Test	FEM
Model Terpilih	Fixed Effect Model

Sumber: Data Diolah, 2026.

Tabel 5 menyajikan ringkasan hasil pemilihan model regresi data panel berdasarkan Chow Test dan Hausman Test. Kedua pengujian secara konsisten menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk mengestimasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Belanja Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat karakteristik spesifik yang berbeda pada masing-masing pemerintah daerah dan karakteristik tersebut memengaruhi hubungan antarvariabel penelitian. Dengan menggunakan Fixed Effect Model, heterogenitas yang tidak dapat diamati (*unobserved heterogeneity*) dapat dikendalikan sehingga koefisien regresi yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan tidak bias. Oleh karena itu, seluruh estimasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan Fixed Effect Model sebagai dasar pengujian hipotesis.

4.3 Uji Diagnostik

Tabel 6. Hasil Uji Diagnostik

Pengujian	Statistik	Prob	Kesimpulan
Multikolinearitas (VIF)	2.41	-	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas	1.87	0.176	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Wooldridge Test	1.25	0.274	Tidak terdapat autokorelasi
Pesaran CD Test	0.94	0.348	Tidak terdapat cross-sectional dependence

Sumber: Data Diolah, 2026.

Tabel 6 menunjukkan bahwa model regresi panel telah memenuhi asumsi diagnostik yang diperlukan sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 2,41 mengindikasikan tidak terdapat masalah multikolinearitas karena nilainya masih berada di bawah batas umum sebesar 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen tanpa mengalami korelasi yang tinggi satu sama lain. Hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,176 ($>0,05$), sehingga varians residual dapat dianggap homogen. Demikian pula, Wooldridge Test menunjukkan probabilitas sebesar 0,274 ($>0,05$), yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi pada residual model. Hasil Pesaran Cross-sectional Dependence Test juga menghasilkan probabilitas sebesar 0,348 ($>0,05$), sehingga tidak ditemukan ketergantungan antarunit observasi.

4.4 Hasil Estimasi Model I

Tabel 7. Hasil Regresi Panel Model I

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-stat	Prob
Ln PAD	0.183	0.058	3.16	0.0024
Ln TKD	0.754	0.097	7.81	0.0000
Constant	2.871	1.025	2.80	0.0067
R ² = 0.884				
Adjusted R ² = 0.867				
F-stat = 82.64				
Prob(F)=0.0000				

Sumber: Data Diolah, 2026.

Tabel 7 menyajikan hasil estimasi Model I yang menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Belanja Daerah. Nilai Adjusted R² sebesar 0,867 menunjukkan bahwa sekitar 86,7% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi PAD dan TKD, sedangkan sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai Prob(F) sebesar 0,0000 mengindikasikan bahwa model regresi secara simultan signifikan, sehingga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan Belanja Daerah.

Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien sebesar 0,183 dengan probabilitas 0,0024, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% diikuti peningkatan Belanja Daerah sekitar 0,183%, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, Transfer ke Daerah memiliki koefisien sebesar 0,754 dengan probabilitas 0,0000, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien TKD yang jauh lebih besar dibandingkan PAD mengindikasikan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap perubahan dana transfer daripada peningkatan penerimaan daerah sendiri.

4.5 Hasil Estimasi Model II

Tabel 8. Hasil Regresi Panel

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-stat	Prob
Ln PAD	0.472	0.152	3.11	0.0028
Ln TKD	0.219	0.103	2.13	0.0367
Ln Belanja	0.653	0.169	3.86	0.0003
Constant	42.614	4.516	9.43	0.0000
R ² =0.812				
Adj R ² =0.793				
Prob F=0.000				

Sumber: Data Diolah, 2026.

Tabel 8 menyajikan hasil estimasi Model II yang menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,793 menunjukkan bahwa sekitar 79,3% variasi Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sedangkan 20,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, seperti tingkat kemiskinan, kualitas tata kelola, pertumbuhan ekonomi, maupun karakteristik sosial ekonomi daerah. Nilai Prob(F) sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan koefisien sebesar 0,472 ($p < 0,01$). Transfer ke Daerah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,219 ($p < 0,05$). Selain itu, Belanja Daerah memiliki koefisien terbesar, yaitu 0,653 ($p < 0,01$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia lebih banyak dipengaruhi oleh efektivitas pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan hanya oleh peningkatan kapasitas fiskalnya.

4.6 Analisis Mediasi

Tabel 9. Direct, Indirect dan Total Effect

Hubungan	Direct	Indirect	Total	Mediasi
PAD → IPM	0.472	0.119	0.591	Partial
TKD → IPM	0.219	0.492	0.711	Partial

Sumber: Data Diolah, 2026.

Tabel 9 menyajikan hasil analisis pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), dan pengaruh total (*total effect*) untuk mengevaluasi peran mediasi Belanja Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,472, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui Belanja Daerah sebesar 0,119, sehingga menghasilkan pengaruh total sebesar 0,591. Sementara itu, Transfer ke Daerah memiliki pengaruh langsung sebesar 0,219 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,492, sehingga menghasilkan pengaruh total sebesar 0,711.

Besarnya pengaruh tidak langsung Transfer ke Daerah yang melebihi pengaruh langsung menunjukkan bahwa Belanja Daerah merupakan mekanisme utama yang menyalurkan manfaat dana transfer terhadap peningkatan pembangunan manusia. Sebaliknya, pengaruh tidak langsung PAD relatif lebih kecil dibandingkan pengaruh langsungnya, sehingga peningkatan PAD lebih banyak memberikan dampak terhadap pembangunan manusia melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah berperan sebagai partial mediator, karena baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung tetap signifikan.

Tabel 10. Sobel Test

Jalur	Sobel Z	Prob
PAD→Belanja→IPM	2.98	0.002
TKD→Belanja→IPM	4.82	0.000

Sumber: Data Diolah, 2026.

Untuk memastikan signifikansi efek mediasi, dilakukan pengujian menggunakan Sobel Test sebagaimana disajikan pada Tabel 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jalur Pendapatan Asli Daerah → Belanja Daerah → Indeks Pembangunan Manusia menghasilkan nilai statistik Sobel sebesar 2,98 dengan probabilitas 0,002, sedangkan jalur Transfer ke Daerah → Belanja Daerah → Indeks Pembangunan Manusia menghasilkan nilai statistik Sobel sebesar 4,82 dengan probabilitas 0,000. Kedua nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga efek mediasi Belanja Daerah dinyatakan signifikan.

Hasil tersebut mengonfirmasi bahwa Belanja Daerah berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang menjembatani pengaruh kapasitas fiskal terhadap pembangunan manusia. Dengan kata lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun Transfer ke Daerah akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia apabila diikuti oleh pengalokasian Belanja Daerah yang produktif. Temuan ini mendukung Fiscal Federalism Theory yang menempatkan Belanja Daerah sebagai instrumen utama penyediaan pelayanan publik, sekaligus memperkuat Flypaper Effect Theory bahwa dana transfer lebih responsif diterjemahkan menjadi pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Belanja Daerah terbukti memediasi hubungan antara kapasitas fiskal dan pembangunan manusia, sehingga peningkatan kapasitas fiskal hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila diterjemahkan ke dalam Belanja Daerah yang produktif.

Pengaruh positif PAD terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal memperbesar kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan *Fiscal Federalism Theory* yang

menyatakan bahwa PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (Oates, 1972). Namun, pengaruh TKD terhadap Belanja Daerah terbukti lebih besar dibandingkan PAD, yang menunjukkan bahwa struktur belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh dana transfer. Temuan ini mendukung *Flypaper Effect Theory*, yaitu pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap dana transfer daripada pendapatan asli daerah (Hines & Thaler, 1995).

Dominasi TKD juga dapat dijelaskan melalui *Fiscal Illusion Theory*, yang menyatakan bahwa ketergantungan pada dana transfer dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mengoptimalkan PAD. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal melalui transfer harus diimbangi dengan tata kelola anggaran yang akuntabel dan efektif agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PAD dan TKD berpengaruh positif terhadap IPM. Namun, besarnya pengaruh Belanja Daerah mengindikasikan bahwa pembangunan manusia lebih ditentukan oleh efektivitas pengalokasian sumber daya fiskal daripada besarnya penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan *Human Development Theory* yang menekankan bahwa pembangunan berorientasi pada perluasan kapabilitas masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Sen, 1999). Dengan demikian, manfaat PAD dan TKD terhadap IPM sangat bergantung pada alokasi Belanja Daerah yang produktif.

Peran Belanja Daerah sebagai variabel mediasi menjadi temuan utama penelitian ini. Baik pengaruh PAD maupun TKD terhadap IPM sebagian disalurkan melalui Belanja Daerah, sehingga keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efektif. Temuan ini sekaligus memperkuat *Flypaper Effect Theory*, di mana manfaat TKD terhadap pembangunan manusia lebih banyak terjadi melalui peningkatan Belanja Daerah, sedangkan PAD juga mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kapasitas kelembagaan daerah.

Temuan penelitian konsisten dengan penelitian Verawaty et al. (2020), Rajkumar dan Swaroop (2008), serta Faguet (2014) yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal dapat meningkatkan pembangunan manusia apabila didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada dana transfer melalui optimalisasi PAD serta

meningkatkan kualitas Belanja Daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan *Fiscal Federalism Theory*, *Flypaper Effect Theory*, *Fiscal Illusion Theory*, dan *Human Development Theory* untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal dan pembangunan manusia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menguji pengaruh langsung PAD atau TKD terhadap IPM, penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah merupakan mekanisme mediasi utama yang mentransformasikan kapasitas fiskal menjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dengan pengaruh TKD yang lebih dominan. Temuan ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana transfer serta memberikan bukti empiris mengenai keberadaan *Flypaper Effect*, yaitu kecenderungan pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan peningkatan PAD.

Selain itu, PAD, TKD, dan Belanja Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Belanja Daerah juga berperan sebagai *partial mediator* yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal hanya akan meningkatkan pembangunan manusia apabila dialokasikan secara efektif melalui belanja publik. Temuan ini memperkuat *Fiscal Federalism Theory*, sekaligus memperkaya literatur mengenai *Flypaper Effect* dan *Fiscal Illusion Theory* dengan menunjukkan bahwa efektivitas Belanja Daerah menjadi faktor utama dalam mentransformasikan kapasitas fiskal menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD serta meningkatkan kualitas Belanja Daerah dengan pendekatan *performance-based budgeting* dan *outcome-based budgeting*, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu menyempurnakan mekanisme Transfer ke Daerah melalui skema transfer berbasis kinerja guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan mengurangi ketergantungan fiskal daerah.

Penelitian ini masih terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan variabel PAD, TKD, Belanja Daerah, dan IPM, serta menerapkan model regresi data panel statis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel lain yang memengaruhi pembangunan manusia, serta menggunakan pendekatan ekonometrika yang lebih maju, seperti *Dynamic Panel Generalized Method of Moments (System-GMM)*, *Spatial Panel Model*, atau *Panel Structural Equation Modeling*, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Adriyanto, A. (2014). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sarolangun. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/pim.v2i1.13974>
- Agus, P. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 20–36. <https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.3>
- Al Rasyid, H., & K, A. T. I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2022. *Owner*, 7(4), 3691–3701. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1953>
- Anggreani, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Telanja Daerah di Pare-Pare. 9, 356–363.
- Arafat, L., Wiwiek Rindayati, & Sahara. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 140–158. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.2018.140-158>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah(2025a). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. <https://kalteng.bps.go.id/id>
- Bisai, C. M., Kbarek, M., & Pajeru, A. R. (2020). Analisa Pembangunan Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(3), 184–219. <https://doi.org/10.52062/keuda.v4i3.1125>
- Boadway, R., & Shah, A. (2009). *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorde Governance*.
- Buchanan, J. M. (1967). *Public Finance in Democratic Process*.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*.

- Gamkhar, S., & Shah, A. (2007). The Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers: A Synthesis of the Conceptual and Empirical Literature.
- Ginting, S., Kuriata, C., Lubis, I., & Mahalli, K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, 4(1), 17–24. <http://dspace.uui.ac.id/123456789/45093>
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226.
- Human Development Report. (1990). Human development report 1991. In *International Affairs* (Vol. 68, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/2620504>
- Ikhsan, M. (2020). Konsep Keuangan Publik. *Administrasi Keuangan Publik*, 1–62.
- Inman, R. P. (2008). The Flypaper Effect.
- Jin, H., & Jakovljevic, M. (2023). Fiscal decentralization and the human development index: A cross-border empirical study. *Sustainability*, 15(11), 8784. <https://doi.org/10.3390/su15118784>
- Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhi. Kementerian Dalam Negeri, 1–35.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Portal Data APBD. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Lestari, D. D. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *Skripsi*, 78.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (JEJAK)*, 4(2), 102–113.
- Mohammad Abdul Mukhyi. (2024). Teori Ekonomi.
- Muhammed Wahed, Sishadiyati, D. E. N. I. (2021). Ekonomi Pembangunan kajian Teori dan Studi Empiris.
- Nugroho, M. E., & Hendrati, I. M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang Tahun 2007-2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2954. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5727>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism.
- Oates, W. E. (1979). Lump-Sum Intergovernmental Grants Have Price Effects.
- Pasa, S. R., Kawung, G. M. ., & Rorong, I. P. F. (2023). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi dan

Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(1), 80–94.

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023. *Pengelolaan Transfer Ke Daerah*, 37(142608), 32.

Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? *Journal of Development Economics*, 86(1), 96–111. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003>

Reza, A., Ahmed, A. N. M. F., & Choudhury, A. R. (2025). Economic recovery and growth post-COVID-19 : A comparative analysis of emerging markets. 22(03), 1–12.

Simanjuntak, P. J. (2012). Manajemen dan evaluasi kinerja. 63–77.

Sokil, O., Podolchak, N., Bilyk, O., Tsygulyk, N., & Chepil, B. (2024). Economic Recovery Modelling From COVID-19 Impact. *E3S Web of Conferences*, 558. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455801026>

Sulistyo Wardani, R. I. P. (2022). *Jurnal Ilmiah M-Progress*. 12(1), 13–25.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Pearson Addison Wesley. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>

United Nations Development Programme. (2004). Human Development Report. In *Human Development* (Issue July). http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf

Urfah, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023).

Verawaty, Wahasusmiah, R., & Amnah. (2020). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal. *Forum Dosen Akuntansi Publik*, 1, 1–15.